



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 202 /B.V/HK/2016

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/101/B.V/HK/2016 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Nomor : 930/527/III.15/A.2/2016 tanggal 15 Maret 2016 Perihal Usulan Perubahan Nama pada Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/101/B.V/HK/2016;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016 yang dikelola oleh Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/101/B.V/HK/2016;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.23/215/II.10/2016 tanggal 3 Maret 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas nama Ir. Jabuk, MTA Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) NIP. 19641204 199203 1 004 dan usulan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Perihal Usulan Perubahan Nama pada Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/101/B.V/HK/2016, serta untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/101/B.V/HK/2016, perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/101/B.V/HK/2016 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.**

KESATU : Merubah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/101/B.V/HK/2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang berkenaan dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/101/B.V/HK/2016, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut terhitung mulai tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 5 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara
Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/202/B.V/HK/2016
 TANGGAL : 10 MEI 2016

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA),
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM),
 BENDAHARA PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SP DIPA-018.05.3.129072/ 2016 07-12-2015	(018) (05) (12) (129072)	-	2.780.641.000,-	Ir. Edi Yanto, M.Si NIP. 19620101 198903 1 013 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.	-	-	-	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
1.1.	SP DIPA-018.05.3.129072/ 2016 07-12-2015	018.05.08.	Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	2.780.641.000,-	Ir. Edi Yanto, M.Si NIP. 19620101 198903 1 013 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.	Ir. Vieke Sandranita. MM NIP. 19680821 199903 2 004 Pembina (IV/a)	Ir. Herawati Yusuf NIP.19591231 198603 2 053 Pembina Tk. I (IV/b)	Dewi Masitoh NIP. 19710209 200212 2 001 Pengatur (II/c)	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
1.1.1.	SP DIPA-018.05.3.129072/ 2016 07-12-2015	018.05.08. 1779	Dukungan Perlindungan Perkebunan	1.060.841.000,-	Ir. Edi Yanto, M.Si NIP. 19620101 198903 1 013 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.	Ir. Vieke Sandranita. MM NIP. 19680821 199903 2 004 Pembina (IV/a)	Ir. Herawati Yusuf NIP.19591231 198603 2 053 Pembina Tk. I (IV/b)	Dewi Masitoh NIP. 19710209 200212 2 001 Pengatur (II/c)	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
1.1.2.	SP DIPA-018.05.3.129072/ 2016 07-12-2015	018.05.08. 1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan.	1.719.800.000,-	Ir. Edi Yanto, M.Si NIP. 19620101 198903 1 013 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.	Ir. Vieke Sandranita. MM NIP. 19680821 199903 2 004 Pembina (IV/a)	Ir. Herawati Yusuf NIP.19591231 198603 2 053 Pembina Tk. I (IV/b)	Dewi Masitoh NIP. 19710209 200212 2 001 Pengatur (II/c)	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
2.	SP DIPA-018.08.3.129028/2016 07-12-2015	(018) (08) (12) (129028)	-	400.000.000,-	Ir. Edi Yanto, M.Si NIP. 19620101 198903 1 013 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.	-	-	-	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.	SP DIPA-018.08. 3.129028/2016 07-12-2015	018.08.11.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	400.000.000,-	Ir. Edi Yanto, M.Si NIP. 19620101 198903 1 013 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.	Ir. Rusdi Widiyanto NIP. 19590712 198603 1 009 Pembina Tk. I (IV/b)	Ir. Herawati Yusuf NIP. 19591231 198603 2 053 Pembina Tk. I (IV/b)	Suratmi, BA NIP. 19591124 198303 2 003 Penata (III/c)	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
2.1.1.	SP DIPA-018.08. 3.129028/2016 07-12-2015	018.08.11. 1794	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	65.700.000,-	Ir. Edi Yanto, M.Si NIP. 19620101 198903 1 013 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.	Ir. Rusdi Widiyanto NIP. 19590712 198603 1 009 Pembina Tk. I (IV/b)	Ir. Herawati Yusuf NIP. 19591231 198603 2 053 Pembina Tk. I (IV/b)	Suratmi, BA NIP. 19591124 198303 2 003 Penata (III/c)	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
2.1.2.	SP DIPA-018.08. 3.129028/2016 07-12-2015	018.08.11. 1795	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	80.000.000,-	Ir. Edi Yanto, M.Si NIP. 19620101 198903 1 013 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.	Ir. Rusdi Widiyanto NIP. 19590712 198603 1 009 Pembina Tk. I (IV/b)	Ir. Herawati Yusuf NIP. 19591231 198603 2 053 Pembina Tk. I (IV/b)	Suratmi, BA NIP. 19591124 198303 2 003 Penata (III/c)	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
2.1.3.	SP DIPA-018.08. 3.129028/2016 07-12-2015	018.08.11. 1796	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	22.000.000,-	Ir. Edi Yanto, M.Si NIP. 19620101 198903 1 013 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.	Ir. Rusdi Widiyanto NIP. 19590712 198603 1 009 Pembina Tk. I (IV/b)	Ir. Herawati Yusuf NIP. 19591231 198603 2 053 Pembina Tk. I (IV/b)	Suratmi, BA NIP. 19591124 198303 2 003 Penata (III/c)	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
2.1.4.	SP DIPA-018.08. 3.129028/2016 07-12-2015	018.08.11. 1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	208.300.000,-	Ir. Edi Yanto, M.Si NIP. 19620101 198903 1 013 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.	Ir. Rusdi Widiyanto NIP. 19590712 198603 1 009 Pembina Tk. I (IV/b)	Ir. Herawati Yusuf NIP. 19591231 198603 2 053 Pembina Tk. I (IV/b)	Suratmi, BA NIP. 19591124 198303 2 003 Penata (III/c)	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
2.1.5.	SP DIPA-018.08. 3.129028/2016 07-12-2015	018.08.11. 3993	Fasilitas Pupuk dan Pestisida	12.000.000,-	Ir. Edi Yanto, M.Si NIP. 19620101 198903 1 013 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.	Ir. Rusdi Widiyanto NIP. 19590712 198603 1 009 Pembina Tk. I (IV/b)	Ir. Herawati Yusuf NIP. 19591231 198603 2 053 Pembina Tk. I (IV/b)	Suratmi, BA NIP. 19591124 198303 2 003 Penata (III/c)	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
2.1.6.	SP DIPA-018.08. 3.129028/2016 07-12-2015	018.08.11. 3994	Pelayanan Pembinaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	12.000.000,-	Ir. Edi Yanto, M.Si NIP. 19620101 198903 1 013 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.	Ir. Rusdi Widiyanto NIP. 19590712 198603 1 009 Pembina Tk. I (IV/b)	Ir. Herawati Yusuf NIP. 19591231 198603 2 053 Pembina Tk. I (IV/b)	Suratmi, BA NIP. 19591124 198303 2 003 Penata (III/c)	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO